

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Desa Bekiring merupakan suatu desa yang terletak di lereng sebelah barat pengunungan Wilis. Desa ini terdiri dari 3 Dukuh ialah Krajan, Bintoro, Nguncup serta ada 16 Rt dan 6 Rw. Sekalipun bisa dikatakan sebagai daerah pinggiran, namun bekiring terbilang mudah untuk dijangkau hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota. Keadaan awal desa ini termasuk desa susulan dan terbelakang serta terisolir, dimana letaknya memang kurang strategis karena letaknya berada disisi gunung wilis, walaupun demikian penduduk yang bermukim di desa ini semakin banyak.

Menurut penjelasan diberi nama Bekiring adalah Kebek Saka Iring, Artinya walaupun letaknya dilemng gunung penghuni atau penduduknya terus bertambah sehingga padat. Pembabatan desa bekiring adalah Ki Singotani yang asal usulnya kurang jelas. Didesa ini banyak terdapat sumber atau mata air diantaranya Bendorogo, Dinamakan bendorogo karena konon dahulu ketika desa ini masih sepiada seseorang yang menyendiri atau bertapa dibawah pohon Bendo petunjuk dan mujahadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Untuk memperoleh hidayah dan ternyata terkabul, maka tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Bendorogo.

Kondisi sarana prasarana, seperti jalan yang belum memadai karena masih ada beberapa jalan yang masih makadam dan aspal pun juga banyak yang rusak. Namun tidak semua jalanan seperti itu, di Dusun Krajan jalanan sudah dalam bentuk cor, jadi terbilang tidak semua jalanan di Desa Bekiring semuanya rusak. Mata pencaharian warga Desa Bekiring yaitu bertani, hasil pertanian meliputi padi, ketela, jagung dan ada juga sedikit warga yang menanam cengkeh. Untuk menambah perekonomian, sebagian warga memelihara hewan ternak seperti ayam, bebek dan sapi.

Keberadaan Desa Bekiring berasal dari seorang imigran dari kraton Solo Raden Singotani. Dia adalah orang pertama yang memabat hutan di Desa Bekiring untuk dijadikan permukiman. Pertama kali memabat hutan

yaitu dengan menanamkan pohon manggis untuk menandai, yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Menurut penjelasan nama yang diberikan Kebek Saka Iring prosesi, artinya bahwa meskipun terletak dilereng gunung penghuni atau penduduknya terus tumbuh sehingga padat penduduk.

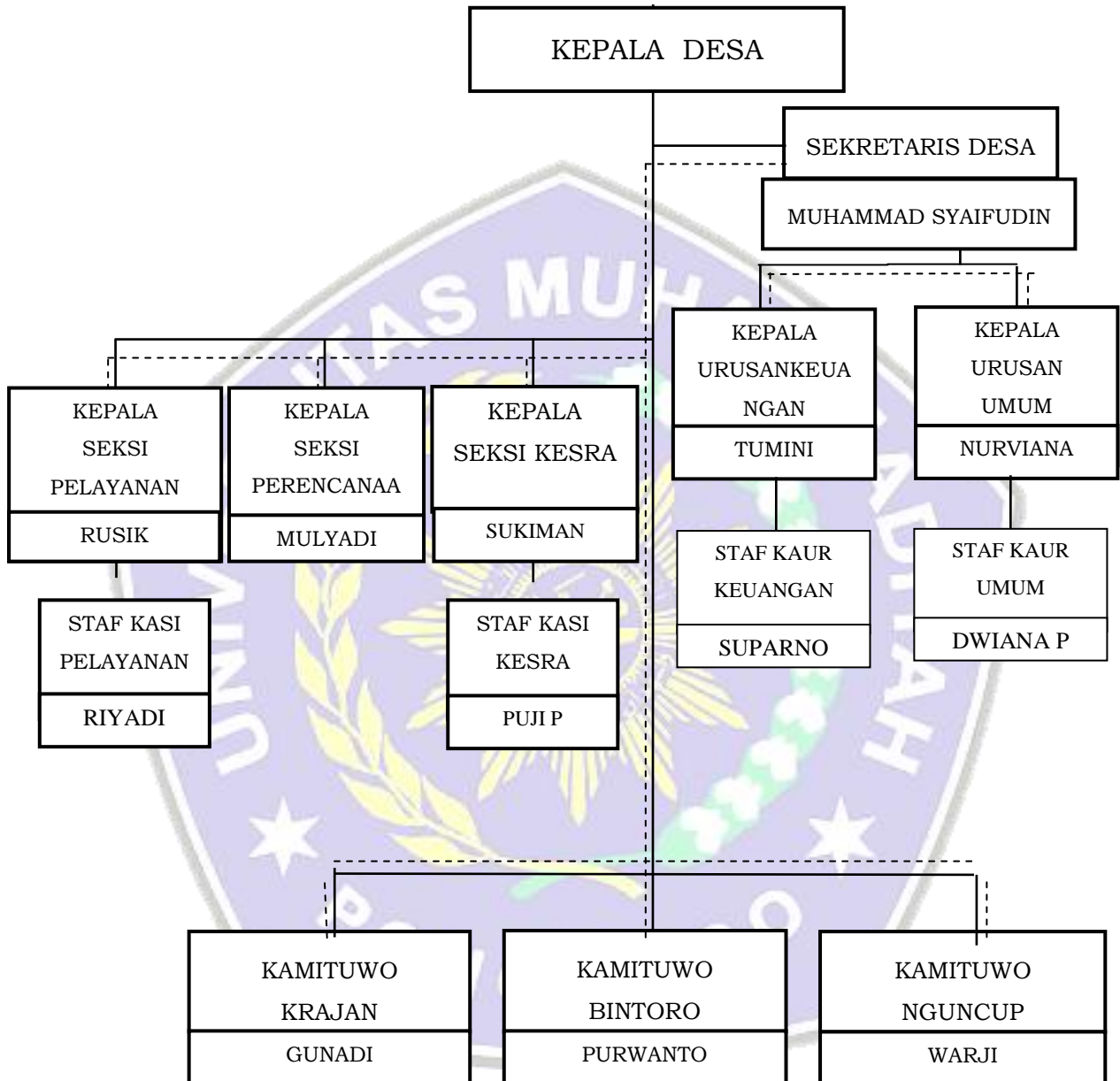
Didesa ini banyak terdapat sumber atau mata air diantaranya Bendorogo, Dinamakan bendorogo karena konon dahulu ketika desa ini masih sepi da seseorang yang menyendiri atau bertapa dibawah pohon Bendo petunjuk dan mujahadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Untuk memperoleh hidayah dan ternyata terkabul, maka tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Bendorogo. Pusat pemerintahan desa Bekiring sendiri terletak di Jl. Bendorogo No. 01. Berikut susunan Organisasi Pemerintahan Desa Bekiring :

Tabel 1
Susunan Nama Pemerintah Desa Bekiring Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Agus Santoso	Kepala Desa	SLTA
1	Muhammad Syaifuddin	Skertaris Desa	SLTA
2	Gunadi	Kamituwo Krajan	SLTA
3	Purwanto	Kamituwo Bintoro	SLTA
4	Warji	Kamituwo Nguncup	SLTA
5	Mulyadi	Kasi Perencanaan	SLTA
6	Rusik	Kasi Pelayanan	SLTP
7	Sukiman	Kasi Kesra	SLTA
8	Tumini	Kaur Keuangan	SLTA
9	Nurviana	Kaur Umum	SLTA
10	Dwiana Puji Lestari	Staf Kaur Umum	SLTA
11	Suparno	Staf Kaur Perencanaan	SLTP
12	Puji Priyanto	Staf Kersa	SLTA
13	Riyadi	Staf Pelayanan	SLTP

(Sumber Data: Profil Desa 2019)

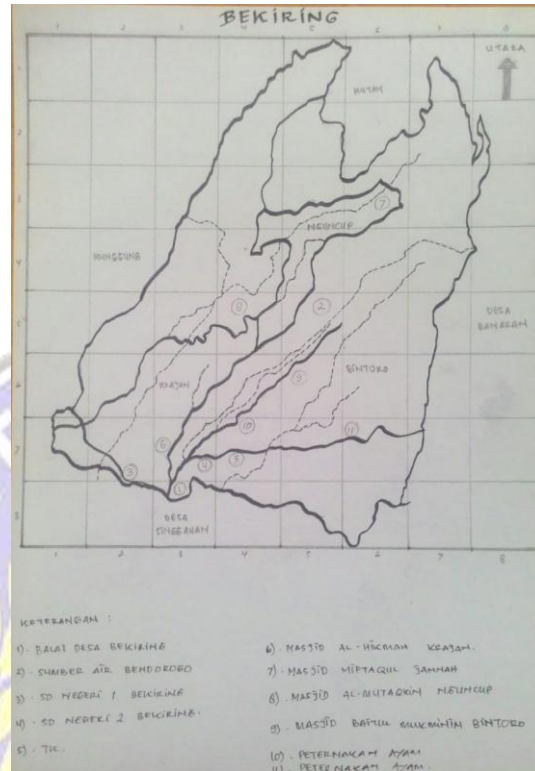
Tabel 2
Struktur organisasi Pemerintah Desa Bekiring Tahun 2019



(Sumber Data: Profil Desa 2019)

B. Kondisi Demografis Obyek Penelitian

Gambar 2
Peta Sketsa Desa



(Sumber Data: Profil Desa 2019)

Secara geografis desa Bekiring adalah desa yang wilayahnya di Kecamatan Pulung, terletak sebelah Timur dari Ibu Kota Ponorogo. Pusat pemerintahan desa Bekiring sendiri terletak di Jl. Bendorogo No. 01. Jarak Desa Bekiring dari kecamatan kurang lebih 8 kilometer sebaliknya jarak Desa Bekiring dari kabupaten ponorogo cukup jauh kurang lebih 23 kilometer. Sistem manajemen kewilayahan Desa Bekiring terpusat menjadi satu pada beberapa aspek. Kondisi desa Bekiring di Kecamatan Pulung adalah berupa dataran tinggi dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Hutan Bekiring
2. Sebelah Timur : Desa Banaran Kecamatan Pulung
3. Sebelah Selatan : Desa Singgahan Kecamatan Pulung
4. Sebelah Barat : Desa Mungging Kecamatan Pulung

Desa Bekiring belum memiliki pembangunan infrastruktur yang baik. Sehingga masyarakat desa masih susah untuk melakukan mobilitasnya. Keberadaan fasilitas serta prasarana infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi serta komunikasi dan distribus barang serta jasa bisa dirasakan secara menyeluruh oleh warga sebab seluruh warga memiliki peluang buat berkembang serta tumbuh dan maju bersama sehingga bisa kurangi tingkatan kesenjangan antar dusun. Kondisi jalan pada dikala ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan jalan belum diimbangi dengan peningkatan mutu serta sistem pemeliharaan yang belum maksimal.

Tabel 3
Sarana Dan Prasarana Transportasi

No	Uraian	Keterangan
A	Jalan	3,49 Ha
B	Kondisi Jalan	
1	Baik	50 %
2	Sedang	20 %
3	Buruk	30 %

(Sumber Data: Profil Desa 2019)

Tabel 4
Sarana Dan Prasarana Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK / PAUD	1
2	SD / MI	2

(Sumber Data: Profil Desa 2019)

Fasilitas pembelajaran di Desa Bekiring terkategori masih sangat kurang. Sebab Cuma terdapat TK dan SD. Aksesibilitas bidang pembelajaran secara universal telah lumayan mencukupi, namun dilihat dari segi

pembelajaran di desa bekiring sudah cukup baik. Hanya saja minimnya tenaga pengajar di lembaga pendidikan SD Bekiring.

Tabel 5
Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana / Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	4
2	Polindes	1

(Sumber Data: Profil Desa 2019)

Di Desa Bekiring memiliki sarana kesehatan posyandu dan Polindes. Desa Bekiring sudah melakukan posyandu rutin untuk balita dan sudah ada posyandu lansia. Namun Kebersihan lingkungan dan juga kesehatan kurang diperhatikan di masyarakat. Dengan adanya posyandu balita dan lansia ini akan memudahkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik.

Tabel 6
Lahan Potensi SDA

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Pertanian	172,30	Ha
2	Lahan Tegall / Ladang	11,00	Ha
3	Lahan Permukiman	50,00	Ha
4	Lahan Pekarangan	69,60	Ha
5	Perkebunan Rakyat	3	Ha

(Sumber Data: Profil Desa 2019)

Wilayah Pemerintahan Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 3 wilayah kependudukan yaitu Dukuh Nguncup, Bintoro, dan Krajan. Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah total Luas Wilayah : 528.8 Ha yang diantaranya untuk lahan potensi SDA seluas : 305.9.

Desa Bekiring merupakan daerah yang terdiri wilayah pertanian serta perkebunan dengan kondisi geografis terletak pada perbukitan lumayan besar. Tidak hanya pertanian serta perkebunan, desa ini memiliki sumber energy alam yang paling utama sumber air secara natural telah terdapat. Keadaan alam mempengaruhi kehidupan warga terlebih dalam penyesuaian hawa tanam yang sesuai buat lahan pertanian serta perkebunan.

Berdasarkan pemutahiran data pada tahun 2019, desa Bekiring memiliki jumlah penduduk 2.214 jiwa yang terdiri dari 1.105 laki-laki dan 1.109 perempuan. Jumlah kepala keluarga sejumlah 774 Kepala Keluarga.

Tabel 7
Data SDM Desa Bekiring

No	Tanggal	Jumlah Laki-Laki (Orang)	Jumlah Perempuan (Orang)	Jumlah Total (Orang)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
1	14/02/2019	1.105	1.109	2.214	774	418
2	19/09/2018	1.105	1.109	2.214	774	418
3	17/10/2017	1.105	1.109	2.214	774	418
4	10/11/2016	1.108	1.120	2.228	775	421
5	21/10/2015	1.108	1.120	2.228	775	421
6	15/11/2014	1.102	1.115	2.217	773	936

(Sumber Data: Profil Desa 2019)

Tabel 8
Data Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Peternak	19	0	19
2	Petani	115	110	225
3	Pegawai Negeri Sipil	5	0	5
4	Dokter swasta	0	0	0
5	Bidan swasta	0	1	1
6	Pedagang Keliling	4	0	4
7	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	0	0	0
8	Tukang Listrik	1	0	1
9	Buruh Migran	0	0	0
10	Buruh Tani	620	636	1.256
Jumlah		764	747	1.511

(Sumber Data: Profil Desa 2019)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Bekiring bekerja sebagai petani yaitu 225 orang dari jumlah penduduk dan 1.256 bekerja sebagai buruh tani. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa potensi sumber daya manusia penduduk desa Bekiring masih kurang baik. Masyarakat desa Bekiring tergolong masyarakat yang kurang produktif dan kurang giat dalam bekerja, ini merupakan tanda kurang baik yang akan berpengaruh negatif untuk kemajuan atau pembangunan desa.

Tabel 9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Tamat D-3/sederajat	1	3	4
2	Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	140	165	305
3	Tamat S-1/sederajat	4	5	9
4	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	170	158	328
Total		315	331	646

(Sumber Data: Profil Desa 2019)

Minimnya pemahaman dari masyarakat terhadap pentingnya pendidikan mengakibatkan pendidikan di desa bekiring masih sangat rendah. Presentase pendidikan hanya 80% untuk tingkat SD, 15% SMP, dan sisanya 5% SMA/SMK/ perguruan tinggi.

C. Data Teknis Obyek Penelitian

1. Pengelolaan Sumber Daya Air Bendorogo

Kebijakan adalah arah / tindakan yang di tetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk membuat pedoman, pegangan atau arah dalam pengembangan program / kegiatan untuk mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pemerintah desa yang hendak dicapai meliputi 4 aspek mendasar, yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan sumberdaya air dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan sudah sepatutnya tidak mengabaikan peran pemerintah desa serta masyarakat yang kerap kali merasakan dampak langsung dari bencana kekeringan yang terjadi. Masyarakat memiliki kapasitas untuk

berpartisipasi dalam pengelolaan mata air. Keberadaan pemerintah desa mendorong pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk masyarakat menguat setelah munculnya UU No 7 2004, Pasal 17 Tentang Sumber Daya Air. Memberikan wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain meliputi :

- a. Mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan atau pemerintah di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum.
- b. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya.
- c. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atau air sesuai dengan ketersediaan air yang ada
- d. Memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Sesuai dengan UU No. 6/2014 desa memiliki empat domain dan kewenangan: pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif desa yang melihat bahwa desa adalah entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat). Secara historis sebelum lahir pemerintahan NKRI, desa sudah secara mandiri menjalankan pemerintahan (mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat) seperti mengelola sumber daya alam seperti air, sawah , irigasi, hutan , kebun , keamanan, ketenteraman, kekayaan desa, hubungan sosial dan lain-lain

Tabel 11
Kebijakan pemerintah desa

No	Bidang	Sasaran
1	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif. b. Tersusunnya RPJM dan RKP Desa c. Terlaksananya penatausahaan keuangan desa secara tertib. d. Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna. e. Tersusunnya data profil desa yang akurat dan update.
2	Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. b. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. c. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif. d. Pelestarian lingkungan hidup.
3	Pembinaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. b. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya masyarakat.
4	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan. b. Pelatihan teknologi tepat guna. c. Peningkatan kapasitas masyarakat.

(Sumber Data: RPJM Desa Bekiring 2015-2019)

Desa Bekiring sendiri mempunyai dua penampungan besar dengan letak yang berbeda yang satu berada dipuncak atas, dan yang satu ada didepan kantor desa Bekiring yang tak lain digunakan untuk pusat pengisian tanki air. Untuk siapapun yang mau mengambil sumber air dari bendorogo ini harus datang ke kantor desa untuk izin terlebih dahulu. Adapun sistem dari desa, siapapun yang mengambil air didesa ini akan dikenakan kontribusi senilai Rp. 25.000 pertanki yang berisi 8000 liter air. Kedua tandon ini adalah pusat penyimpanan air bersih yang akan disalurkan kerumah-rumah warga. Setelah selesai semua pelaksanaan program pengelolaan air bersih warga bisa menikmati air tanpa harus berjalan kaki lagi kesugai untuk mendapatkan air, karena beberapa sumber air yang ada didesa Bekiring masih alami dan layak untuk dijadikan air minum. Salah satu yang layak untuk dijadikan air minum ini adalah sumber air Bendorogo.

2. Sumber Daya Air di Desa Bekiring

Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia dan benar-benar harus tersedia untuk menunjang kehidupan dan. Masyarakat dengan pengetahuan, kebiasaan dan budaya yang diwariskan turun menurun memanfaatkan sumber daya air di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mengelola sumber daya air ini secara bersama-sama dan hidup dalam harmoni dengan alam sekitarnya. Kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia sayangnya banyak mengalami pergeseran. Kebutuhan air terus meningkat dengan peningkatan populasi (dengan berbagai jenis kebutuhan) dan kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian sumber daya air dan lingkungan yang ada. Air saat ini telah menjadi pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena penurunan kapasitas dan kualitas sumber daya air di sebagian besar wilayah. Kearifan lokal sebagai modal sosial sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah. Kearifan lokal mempunyai dua peran utama, yaitu: memenuhi kebutuhan air untuk hidup dan kehidupan masyarakat, dan menjaga

hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan sumber daya air dan lingkungan di sekitarnya. (Hidayati, 2017)

Desa Bekiring merupakan desa yang terletak di pegunungan, Itulah penyebabnya mengapa Desa Bekiring memiliki anugerah desa yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya airnya. Desa Bekiring bisa dikatakan memiliki keunggulan dibandingkan desa-desa yang lain karena sumber airnya. Sumber air bendorogo ini juga sudah menjadi pemasok air bagi orang-orang yang ada diwilayah kota dan kualitas air bendorogo ini pun mempunyai kualitas yang baik, bahkan saat diuji lab sumber air yang ada di Desa Bekiring ini jernih tanpa ada bakteri dan bisa diminum secara langsung tanpa dimasak.

3. BUMDes Sebagai Pengelola Sumber Daya Air

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu lembaga yang ekonomi pedesaan yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Sebagai salah satu program unggulan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 diartikan sebagai suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-mensejahterakan masyarakat desa. (Bruno, 2019)

BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah Bottom- up planning) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan mendirikan BUMDes pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan perekonomian desa, (2) Meningkatkan Pendapatan Desa, (3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan distribusi

ekonomi desa (Mustanir, 2019). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Dalam adanya BUMDes di Desa itu sendiri perlu adanya pembentukan, dan dalam pembentukan BUMDes ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah (bottom-Up Planning) dan perencanaan dari atas (Top-Down Planning). Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah (bottom-Up Planning) adalah bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara perencanaan dari atas adalah (Top-Down Planning) yang berarti proses pembentukan BUMDes atas dasar instruksi dari pemerintah. Supaya keberadaan lembaga pembangunan ekonomi tersebut tidak dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu (pemilik modal besar), kepemilikan lembaga-lembaga ini harus dikelola bersama oleh desa dan dikendalikan bersama sehingga tujuan utama dari lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. (Atmojo 2015). Salah satu desa yang telah mendirikan Program BUMDes adalah desa Bekiring di Kecamatan Pulung Ponorogo.

Pendirian BUMDes Bekiring termasuk dalam perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-Up Planning), hal ini karena BUMDes Bekiring tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, namun berdasarkan inisiatif dari salah satu warga desa yang ingin menggabungkan usaha desa yang sudah ada sebelumnya dalam rangka untuk menempatkan bersama-sama di sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha lain yang menguntungkan bagi warga mereka. Setelah mendapatkan usulan dari warga kemudian masyarakat bersama dengan Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan musyawarah bersama-sama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM dan tokoh masyarakat terkait dengan perencanaan pembentukan program

desa. Dari pembahasan ini maka diperoleh kesepakatan dalam bentuk pengenalan program BUMDes sesuai dengan Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 78. (Hayyuna et al., 2014)

Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi pada warga tentang pembentukan BUMDes. Sebagian besar warga menanggapi dengan antusias tentang pembentukan BUMDes tersebut. Hal ini juga karena kondisi ekonomi warga yang sebagian besar rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui lembaga desa untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh warga.

Terdapat tiga kesenjangan berkaitan dengan sumberdaya air yaitu (1) ketersediaan air menurun sedangkan kebutuhan meningkat, (2) peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hidup dimana salah satu faktor penentunya yaitu ketersediaan air, dan (3) peningkatan konversi lahan cenderung menurunkan daerah tangkapan air. (Wijaya et al., n.d.)

Rendahnya kualitas air saat ini merupakan masalah serius, karena masih ada beberapa daerah yang kaya akan sumber daya air, bahkan juga ada yang tidak punya sumber air sama sekali. Namun masih ada juga masalah distribusi yang tidak merata akan sumber daya air ini. Tentunya, kondisi kurangnya sumber daya air ini membutuhkan pengelolaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih sering tidak hanya dihadapkan dengan kurangnya sumber daya air yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga kurangnya sumber daya lainnya, seperti modal dan sumber daya manusia yang tidak mendukung upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di daerah yang miskin dan jauh dari pusat pelayanan publik, kekurangan sumber daya air menjadi masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan.

Fenomena kelangkaan air akan semakin parah jika tidak ada perawatan yang serius, dan tentu saja, dapat menghambat pembangunan daerah. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mengatasi kelangkaan air, dari pengadaan dan pengelolaan oleh pemerintah melalui BUMDes, kemitraan publik-swasta baik dalam konstruksi dan operasional,

keterlibatan sektor swasta yang menyediakan air dalam truk tengki pasokan. Di desa ini masyarakat sebelumnya mengelola sumber daya air di sekitar mereka secara mandiri. Dalam studi kasus diteliti, yaitu di Desa Bekiring, fenomena ini juga muncul, tetapi pengelolaan sumber daya air di sini adalah lebih kompleks, karena ada juga sumber air yang tidak hanya digunakan oleh satu desa saja. Tingkat kompleksitas pengelolaan seluruh wilayah adalah sebuah fenomena menarik, karena sifat dari lembaga desa yang otonom.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemilihan unit usaha yang dilakukan oleh BumDes adalah 1) pendataan dan kajian awal terkait potensi yang tersedia, 2) pemetaan potensi, masalah, dan fasilitasi yang dapat dilakukan, 3) melakukan analisis berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul, dan 4) menyusun skala prioritas potensi mana yang akan dikembangkan berdasarkan manfaat, biaya, dan kebutuhan masyarakat. (Raliby et al., 2018)

Pemerintah dalam hal ini juga sebagai regulator harus berupaya untuk mendirikan sebuah aturan yang jelas dan tegas untuk mendukung kemajuan daerah tanpa mengorbankan hak-hak rakyatnya. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga dituntut untuk berperan sebagai entrepreneur yang handal dan tidak selalu bergantung pada kekuatan pasar, tetapi pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing, salah satunya melalui Milik Dasa (BUMDes).